

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES SALAH TANGKAP  
DI KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BULUKUMBA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**A.INDAH ANUGRAH**  
**10400114096**

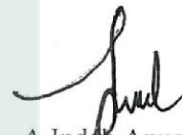
**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Samata, 15 Mei 2018 M

29 Sya'ban 1439 H



A. Indah Anugrah  
NIM 10400114096



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Proses Salah Tangkap Di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba” yang disusun oleh saudari A. Indah Anugrah NIM: 10400114096, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1439 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 15 Mei 2018 M

29 Sya’ban 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag
Munaqisy I	St. Nurjannah, S.H., M.H
Munaqisy II	Ashabul Kahpi, S.Ag., M.H
Pembimbing I	Dr. Jumadi, S.H., M.H
Pembimbing II	Dr. Fadli Andi Natsif, M.H

Diketahui Oleh:

Fakultas Syari’ah dan Hukum,

Dekan  
Alauddin Makassar  
UIN

  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini peneliti persembahkan kepada keluarga terkasih

**Nenek A. Maryam**

**Ayahanda A. Azis Kiba**

**Ibunda Rosdiana Syarif, S.E**

**Kakanda A. Murtafiah Azis, S.Psi**

**Adinda A. Muthahharah Azis**

Serta seluruh keluarga, sahabat, dan teman peneliti yang tulus mendoakan



## MOTTO

*“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”*

*(Abu Bakar Sibli)*

*“Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki atau perempuan, sedangkan ia beriman, niscaya kami hidupan dia dengan kehidupan yang baik dan kami balasi mereka dengan pahala yang terlebih baik dari apa yang mereka amalkan.”*

*( Surat An-Nahl ayat 96-97 )*

*“Jika kamu menginginkan kesuksesan, berjuanglah untuk mendapatkannya. Ditengah jalan, mungkin kamu akan menghadapi berbagai halangan. Jangan berbalik arah dan menyerah. Terus hadapi agar suatu saat kamu bisa melihat kesuksesan di seberang sana. Ibarat kau tak akan pernah mampu menyeberangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan”*

*(A. Indah Anugrah)*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan limpahan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Proses Salah Tangkap Di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba “ yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan keterbatasan dihadapi oleh penulis mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyelesaian tulisan namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama berbagai pihak, hambatan dan kesulitan tersebut dapat dapat teratasi.

Sembah sujud kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, pembimbing hidupku, Ayahanda **Andi Azis.K** dan Ibunda **Rosdiana Syarif,S.E** atas segala cinta dan kasih sayang yang telah kau berikan sejak kecil sampai saat ini, doa semangat serta kerja kerasmu yang membuat penulis bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Dan sembah sujud pun kupersembahkan untuk nenek saya tercinta **Andi Maryam** yang telah merawat saya dan juga saya sudah anggap sebagai orang tua kedua saya, sekaligus membantu menyekolahkan dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Dengan rasa bangga dan haruh saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya tercinta, kakak **A.Murtafiah Azis, S.Psi.** Adik **A.Muthahharah Azis**, atas segala bantuan dan dukungan, baik kepada penulis selama melakukan studi dan keluarga besar yang telah banyak memberikan dorongan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Oleh karena itu melalui tulisan ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.SI. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Istiqamah, S.H.,M.H. dan Rahman Syamsuddin, S.H,M.H masing-masing ketua jurusan dan sekertaris jurusan Ilmu Hukum.
4. Dr.Jumadi, S.H.,M.H. dan Dr.Fadli Andi Natsif, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Aparat Kepolisian yang telah membantu serta semua pihak yang telah memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum B Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 014
8. Sahabat seperjuangan yang sudah menjadi saudaraku ( Ifa, Acci, Uun, Asma, Siska, Evi, Isna, Nunung ). Yang mau berbagi suka duka, canda tawa.
9. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), ( Fani, Jum, Febi 01, Febi 02, Ivi, Jihad, Irfan ) yang sering memberikan semangat serta selalu

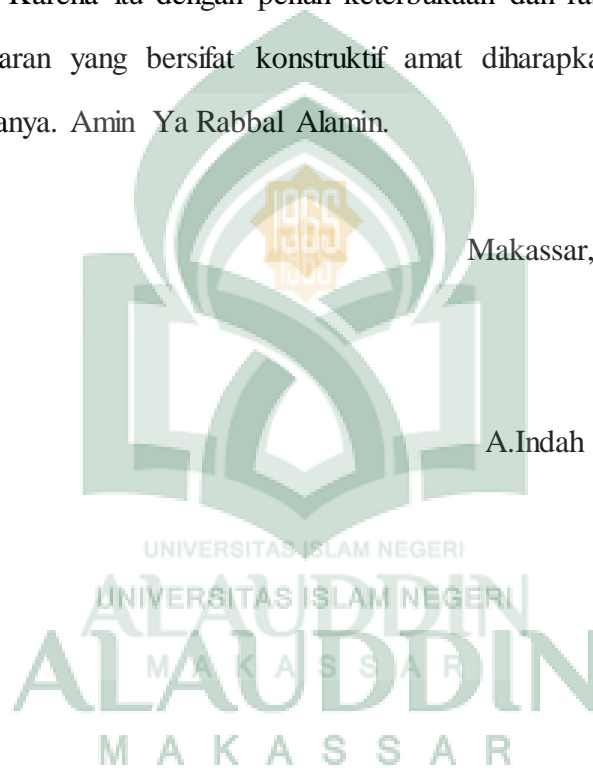
memberikan kekonyolan-kekonyolan yang biasa membuat saya tersenyum dengan berbagai ekspresi.

Semoga bantuan bimbingan, dukungan maupun pengorbanan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu dengan penuh keterbukaan dan rasa rendah hati, segala kritikan dan saran yang bersifat konstruktif amat diharapkan semoga tulisan ini bermanfaat adanya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, 02 Mei 2018

A. Indah Anugrah





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>10</b>
A. Penangkapan.....	10
1. Pengertian Penangkapan.....	10
2. Syarat-syarat Penangkapan.....	13
B. Penyelidikan.....	15
1. Pengertian Penyelidikan .....	15
2. Aparat Penyelidik .....	18
3. Fungsi dan Wewenang Penyelidik.....	18
C. Penyidikan dan Penyidik .....	21
1. Penyidikan .....	21
2. Aparat Penyidik.....	22

D. Tersangka .....	24
1. Pengertian Tersangka Dan Terdakwa .....	24
2. Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa .....	26
E. Salah Tangkap .....	30
1. Pengertian Salah Tangkap .....	30
2. Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Korban Salah Tangkap.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Metode Pendekatan .....	35
C. Sumber Data .....	35
1. Data Primer .....	35
2. Data Sekunder .....	36
3. Data Tersier .....	36
D. Metode Pengumpulan Data .....	37
1. Wawancara .....	37
2. Dokumentasi .....	37
E. Instrumen Penelitian .....	37
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Proses Terjadinya Salah Tangkap Dalam Kasus Pemerkosaan Di Kepolisian Resor Bulukumba .....	44

C. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Resor	
Bulukumba.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>SURAT KETERANGAN WAWANCARA .....</b>	<b>59</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>60</b>



## **ABSTRAK**

**NAMA : A. INDAH ANUGRAH**  
**NIM :10400114096**  
**JUDUL :ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES SALAH**  
**TANGKAP DI KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN**  
**BULUKUMBA**

---

Adapaun masalah pokok dari peneitian ini adalah 1. Bagaimana proses terjadinya salah tangkap dalam kasus pemerkosaan di Kepolisian Resor Bulukumba, 2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum Kepolisian Resor Bulukumba terhadap korban salah tangkap. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya salah tangkap dalam kasus pemerkosaan di kepolisian resor bulukumba, bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum kepolisian resor bulukumba terhadap korban salah tangkap

Dalam permasalahan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis. Selanjutnya jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis yaitu menelaah berbagai buku yang terkait dengan pembahasan yang akan dikaji. Serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat di jelaskan dalam kasus salah tangkap yang dimana seorang penyidik di Kepolisian Resor Bulukumba, akibat terjadinya salah tangkap, pertanggungjawaban yang dilakukan sebenarnya dalam bentuk praperadilan namun praperadilan tersebut tidak dilanjutkan lagi akibat almarhum Syamsuddin telah mmeninggal dunia. Sehingga dalam proses tersebut penyidik yang melakukan salah tangkap hanya diberikan sanksi yakni sanksi administrasi, efek jera dan penyidik harus melakukan pemulihan nama baik atas korban.

Selanjutnya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat dilakukan penuntutan. Artinya, berkewajiban menanggung segala akibat dari perbuatan seseorang tersebut yang disengaja maupun yang tidak disengaja sebagai bentuk perwujudan kesadaran akan kewajiban atas apa yang telah dibuat, baik perbuatan yang merugikan maupun menyenangkan.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang*

Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada warga negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,<sup>1</sup> akan tetapi dalam penerapan hukumnya belum sesuai dengan yang diinginkan, seperti penegakan hukum pidana, masih banyaknya masyarakat Indonesia beranggapan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dan masih banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu contoh yang melanggar Hak Asasi Manusia adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik yaitu oknum Kepolisian Republik Indonesia dalam mencari informasi atau pengakuan oleh tersangka dalam melakukan penyidikan, seperti kasus salah tangkap tahun 1974 terhadap Sengkon dan Karta yang tidak bersalah, sering terulang kembali. Kemudian juga pernah terjadi kasus salah tangkap di Jombang, tiga orang tersangka dipaksa oleh penyidik untuk mengakui telah membunuh Ansori. Pelaku sebenarnya adalah Ryan si pembunuh berantai dari Jombang.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut banyak peristiwa hukum pidana dalam penanganan penyidik selalu diawali dengan penangkapan, biasanya dalam kondisi tertentu saja penyidik melakukan penangkapan, seperti misalnya tertangkap tangan atau tertangkap segera melakukan tindak pidana.

---

<sup>1</sup>Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup>Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 346.

Umumnya proses penyidikan diawali dengan pemanggilan yang diduga pelaku tindak pidana, dan baru akan dilakukan penangkapan bila terdapat bukti bukti awal yang kuat telah terjadinya tindak pidana. Dalam hal adanya surat panggilan, sebaiknya mengikuti aturan KUHAP agar kita segera menghadap penyidik untuk memberikan keterangan akan peristiwa pidana yang terjadi. Sebaiknya anda disertai seorang atau lebih penasehat hukum, agar didalam pemeriksaan dihadapan penyidik benar-benar memelihara dan menghargai hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP. Karena tidak menutup kemungkinan saat dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh penyidik ada hal-hal yang diluar kehendak mereka sebagai tersangka dan atau saksi. Bila melalui pemeriksaan awal sudah terindikasi adanya tindak pidana walaupun statusnya sebagai saksi pada akhirnya akan menjadi tersangka, hal seperti ini bisa terjadi karena memang yang terpanggil benar-benar pelaku tindak pidana, namun bisa juga yang terpanggil salah dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik.

Bagi kalangan awam, menghadap penyidik adalah sebuah beban mental yang amat berat, jika dipaksakan hadir dan diperiksa oleh penyidik ada kemungkinan grogi dan tidak jelas memberikan keterangan sehubungan peristiwa pidana yang terjadi. Manakala penangkapan tiba-tiba saja terjadi, sebaiknya anda jangan panik, sikapi kondisi yang ada dengan tenang, upayakan menanyakan dalam hal apa penangkapan itu dilakukan, dan atas dasar apa pula penyidik melakukan penangkapan. Jika tidak jelas siapa yang melakukan penangkapan sebaiknya menghubungi pengurus lingkungan terdekat, seperti RT atau RW atau kepala kampung terdekat agar dalam penangkapannya diketahui oleh pihak pengurus

lingkungan setempat, karena belum tentu anda bersalah dimata hukum, dan tetap berlaku asas praduga tidak bersalah.

Sebenarnya masih banyak kasus salah tangkap yang tidak terungkap yang dilakukan aparat kepolisian, tetapi karena para korban salah tangkap selalu berada dibawah ancaman sehingga mereka menerima nasib dengan menjalani hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Sistem kerja aparat kepolisian harus di evaluasi, karena penetapan orang tak bersalah sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan besar dan kasus ini adalah suatu pelanggaran HAM.

Pengertian mengenai istilah salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

Adapun fungsi dan wewenang aparat penyidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal 5 KUHAP, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik. *Pertama*, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum aparat penyidik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Menerima laporan dan pengaduan<sup>3</sup>
2. Mencari keterangan dan barang bukti<sup>4</sup>
3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
4. Tindakan lain menurut hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, ( Makassar: Alauddin University Press, 2013 ), hal 45.

<sup>4</sup> Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, hal 46.

<sup>5</sup> Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, hal 47.

*Kedua*, kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu: <sup>6</sup>

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Dalam sistem peradilan pidana yang ditegakkan seringkali terjadi pelanggaran HAM terutama hak-hak dari tersangka dalam rangkaian proses penyidikan suatu perkara pidana yang dimulai dari proses penyidikan dalam upaya paksa. Upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan suatu peraturan yang berlaku yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan lain-lain, dengan adanya upaya paksa, sering melahirkan praktik-praktik represif, seperti penyiksaan dan kekerasan lainnya, hal itu terjadi karena rendahnya kesadaran hukum dalam perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya di lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, yang pada akhirnya menimbulkan kesengajaan tingkah laku hukum.

Dimana dalam Praperadilan menurut KUHAP semula dimaksudkan sebagai lembaga *habeas corpus* sebagaimana dipraktekkan di berbagai negara. Tetapi konkritnya praperadilan hanya untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti

---

<sup>6</sup> Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, hal 48.



kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam pasal 95 KUHP diatur lebih lanjut bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus di sidang praperadilan.<sup>7</sup>

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis akan mengkaji dan mendalami kasus yang dialami Syamsuddin kasus salah tangkap yang terjadi pada Sabtu, 18 Maret 2017 Syamsuddin dijemput oleh aparat Polsek Bulukumpa di kediamannya Bolaperringe, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa atas tuduhan menghamili anak kandungnya sendiri. Syamsuddin di bekuk polisi berdasarkan laporan mantan istrinya yang menuding Syamsuddin telah menghamili NF, anak kandungnya sendiri yang diduga sudah mencapai lima bulan kehamilannya. Anak kandung Syamsuddin yang berinisial NF juga mempunyai penyakit keterbelakangan mental.

Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian mengamankan Syamsuddin hingga akhirnya Syamsuddin tewas di dalam sel tahanan Mapolres Bulukumba pada Minggu malam, 19 Maret 2017. Kerabat korban sangat kaget dengan kematian Syamsuddin yang dinilai tak wajar di dalam sel tahanan dengan luka lebam di sekujur tubuh korban, karena pada saat di jemput polisi, kondisi fisik Syamsuddin

---

<sup>7</sup>Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, (Depok Timur: Paps Sinar Sinanti, 2013), hal 55.

sehat. Sehingga keluarga korban tidak terima dengan kematiannya yang tidak wajar.

Pada kasus ini, ada hal yang menarik untuk dikaji dari sudut pandang hukum, mengingat dalam melakukan suatu penangkapan, penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan aturan hukum acaranya dan pada saat melakukan penyelidikan sebaiknya harus memahami bagaimana kronologi kasus dari awal sampai akhir terjadiya sehingga tidak terjadi kasus salah tangkap. Selain itu sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap yang terlibat paling tidak berupa sanksi moral dan sanksi disipliner dan seharusnya penerapan sanksi pidana menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kinerja POLRI agar lebih profesional.

### ***B. Rumusan Masalah***

Dari uraian latar belakang di atas penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimanakah proses terjadinya salah tangkap dalam kasus pemerkosaan di Kepolisian Resor Bulukumba?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum Kepolisian Resor Bulukumba terhadap korban salah tangkap?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Dalam penelitian ini difokuskan penelitiannya pada persoalan bagaimanakah proses terjadinya salah tangkap dalam kasus pemerkosaan di Kepolisian Resor Bulukumba serta bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum Kepolisian Resor Bulukumba terhadap korban salah tangkap.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan harus memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sehingga penulis dapat memposisikan penelitian ini dari peneliti-peneliti yang terdahulu, penelitian ini bukan hanyalah satu-satunya, sebelumnya juga ada beberapa yang meneliti tentang penyidikan pidana di antaranya sebagai berikut:

Yessi Kurnia Arjani Manik dalam skripsinya dengan judul “ Analisa pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kaitan terhadap terjadinya salah tangkap atau Error In Persona”. melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban penyidik Polri terhadap terjadinya salah tangkap atau error in persona.<sup>8</sup>

Feriy Fardiyanto Prayugo Saputra dalam skripsinya dengan judul “Tinjauan yuridis terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik dalam pelaksanaan upaya paksa dihubungkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kpolisian Rpublik Indonesia dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” melakukan penelitian tentang kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik yang melakukan kekerasan dalam penyidikan dalam penerapan upaya paksa yang dihubungkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang No 39

---

<sup>8</sup> Yessi Kurnia Arjani, “ Analisa pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kaitan terhadap terjadinya salah tangkap atau Error In Persona”, skripsi Tahun 2013.

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , sedangkan dalam penelitian yang penulis susun membahas bagaimana proses penyidikan tindak pidana di Polresta Yogyakarta oleh Kepolisian Rean publik Indonesia sebagai penyidik dalam tahap penyidikan tindak pidana.<sup>9</sup>

Jiyanto Putro Nugroho dalam skripsinya “Upaya pemenuhan hak-hak tersangka anak dalam proses penyidikan (studi kasus polres piyungan yogyakarta)”. Melakukan penelitian tentang proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana yang sesuai dengan perundang-undangan sedangkan dalam skripsi yang penulis susun memaparkan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Yogyakarta.<sup>10</sup>

Rio Pasdi Andora dalam skripsinya “ Analisis yuridis terhadap proses penyidikan tindak pidana di Polresta Yogyakarta”. Melakukan penelitian tentang bagaimana proses penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka tindak pidana di Polresta Yogyakarta.<sup>11</sup>

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penlitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah proses terjadinya salah tangkap dalam kasus pemerkosaan di Kepolisian Resor Bulukumba.

---

<sup>9</sup>Feriy Fardiyanto Prayugo Saputra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasa yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik dalam pelaksanaan Upaya Paksa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, (Lamongan: Universitas Unla), skripsi tahun, 2011.

<sup>10</sup> Jiyanto Putro Nugroho “Upaya pemenuhan hak-hak tersangka anak dalam proses penyidikan (studi kasus polres piyungan yogyakarta)”. Skripsi tahun 2010.

<sup>11</sup> Rio Pasdi Andora “ Analisis yuridis terhadap proses penyidikan tindak pidana di Polresta Yogyakarta ”. Skripsi tahun 2015.

- b. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum Kepolisian Resor Bulukumba terhadap korban salah tangkap.

## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berkaitan tentang perkembangan hukum di Indonesia dalam penegakan hukum pidana, terkait penanganan proses terjadinya salah tangkap dalam kasus pemerkosaan di Kepolisian Resor Bulukumba.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyelidik untuk menerima sanksi apabila telah melakukan kesalahan dalam proses penyelidikan, agar penerapan sanksi pidana menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kinerja POLRI agar lebih profesional terhadap proses penyelidikan, terkait dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hukum Kepolisian Resor Bulukumba terhadap korban salah tangkap.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Penangkapan

##### 1. Pengertian Penangkapan

Pasal 16, pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang tindakan penangkapan. Adapun bunyi dan penjelasan lengkap pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

##### **Pasal 16 KUHAP**

- a. *Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.*
- b. *Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.*

Tindakan penangkapan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik yang bersifat memaksa kepada seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pasal 16 ayat (1) KUHAP di atas, terdapat<sup>12</sup> dua komponen utama, masing-masing yaitu komponen penyidik dan komponen penyidik.

Selanjutnya, pasal 16 ayat (2) KUHAP mengatur tentang kepentingan penangkapan, yaitu untuk kepentingan penyidikan perkara pidana. Dalam pasal ini, tindakan penangkapan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik terhadap orang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hal 164.

<sup>13</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, hal 165.

### **Pasal 17 KUHAP**

*“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.*

Berdasarkan pasal 17 KUHAP di atas, berarti tindakan hukum penangkapan terhadap tersangka harus memenuhi syarat, yaitu hanya kepada setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana, dan tindak pidana yang disangkakan itu harus didukung dengan bukti-bukti permulaan yang cukup.<sup>14</sup>

### **Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP**

- (1) *Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.....*
- (2) *Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu yang terdekat.*
- (3) *Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya setelah penangkapan dilakukan.<sup>15</sup>*

---

<sup>14</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, hal 167.

<sup>15</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, hal 170.

### **Pasal 19 ayat (1) KUHAP**

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Pasal 19 ayat (1) KUHAP di atas menyatakan bahwa pelaksanaan penangkapan hanya dapat dilakukan untuk paling lama selama satu hari, apa yang dimaksud dengan waktu satu hari dalam penangkapan itu, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 31 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

*“satu hari adalah dua puluh empat jam, dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari”<sup>16</sup>*

Berdasarkan KUHAP, setiap surat perintah penangkapan itu harus dibuat secara detail, yaitu dengan cara mencantumkan tanggal dan jam dikeluarkannya surat perintah penangkapan itu, atau dalam surat perintah penangkapan itu harus secara spesifik mencantumkan jam diberlakukannya surat perintah penangkapan itu. Artinya pada jam berapa surat perintah penangkapan itu dinyatakan mulai diberlakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Apabila tidak dicantumkan secara detail, maka akan berisiko adanya gugatan pra peradilan dengan alasan tidaksahnya penangkapan dan menurut hukum, pelaksanaan penangkapan itu harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan (tidak sah).

### **Pasal 19 ayat (2) KUHAP**

*“Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”.*

---

<sup>16</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, hal 171.



Yang dimaksud dengan pelanggaran dalam pasal 19 ayat (2) KUHAP di atas, adalah pengklasifikasian oleh pembuat peraturan perundang-undangan, bahwa perbuatan tertentu dengan ukuran tertentu pula itu dinamakan pelanggaran. Dalam hal ini pelanggaran hanya dapat dipahami oleh rana hukum. Pelanggaran ini dapat ditandai dengan tidak adanya ancaman pemidanaan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan itu terhadap pelanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, terhadap tindakan pelanggaran itu tidak dapat dilakukan penangkapan, terkecuali ditentukan lain, misalnya pelanggar dipanggil oleh polisi sebanyak dua kali dan tidak datang dengan alasan yang tidak wajar, maka dalam hal ini penangkapan dapat saja dilakukan.<sup>17</sup>

## **2. Syarat-Syarat Penangkapan**

Untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka, dipersyaratkan adanya “bukti permulaan yang cukup”. Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

*(1) Alat bukti yang sah ialah:*

- a. Keterangan saksi,*
- b. Keterangan ahli,*
- c. Surat,*
- d. Petunjuk,*
- e. Keterangan terdakwa.*

Dalam pasal 17 KUHAP di atas, untuk menentukan seseorang itu sebagai tersangka dipersyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan

---

<sup>17</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, hal 172.

yang cukup itu di antaranya yaitu adanya keterangan saksi. Keterangan saksi yang diperlukan itu ialah keterangan tentang siapa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, kapan perkara pidana itu terjadi, serta keterangan-keterangan lainnya yang dapat mendukung keyakinan bahwa memang benar peristiwa pidana itu telah terjadi<sup>18</sup>. Keterangan saksi yang benar-benar mengetahui bukan karena berbohong, antara lain dapat dikelompokkan:

1. Saksi yang melihat, yaitu saksi yang secara langsung melihat peristiwa pelanggaran hukum pidana itu
2. Saksi yang mendengar secara langsung terjadinya peristiwa pelanggaran hukum pidana itu.

Penyelidik dan penyidik berdasarkan keterangan saksi di atas, dalam perkara pidana tertentu apabila dianggap perlu, dapat mencari referensi lagi. Referensi itu dapat saja berupa dokumen-dokumen hukum yang baku, yang berupa peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen hukum yang dibuat karena kepentingan suatu peristiwa hukum perdata atau peristiwa hukum tata usaha negara, antara lain dokumen-dokumen perizinan, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa semacam ini biasanya berkaitan dengan kewenangan badan pemerintahan. Apabila perkara pidana itu tidak berkaitan dengan kewenangan badan pemerintahan, biasanya perkara pidana itu hanya diatur dalam ketentuan KUHP saja.

Selanjutnya, bukti yang lain ialah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang

---

<sup>18</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, hal 168.

benar dan tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan.

Kemudian bukti surat (dokumen) adalah bukti yang dapat dikatakan lebih permanen, dengan catatan bahwa bukti surat (dokumen) itu adalah bukti yang valid. Dengan bukti surat itu maka akan didapatkan kemudahan-kemudahan untuk mengungkap peristiwa pidana serta kedudukan hukumnya yang sesungguhnya. Bukti surat ini biasanya berkaitan dengan masalah status penguasaan, status kepemilikan, dan status kekuatan hukumnya. Perbedaan status penguasaan dengan status<sup>19</sup> kepemilikan, bahwa status penguasaan tidak berarti yang dikuasakan itu berkuasa mutlak, misalnya penguasaan hanya dalam batas waktu tertentu, penguasaan dalam jumlah tertentu, penguasaan dalam hal tertentu, sedangkan bukti kepemilikan adalah tanda bukti yang mempunyai nilai berhak atau berkuasa untuk lingkup yang lebih luas.

Dengan bukti yang berupa surat menyurat atau dokumen-dokumen itu, maka seorang penyelidik harus dapat memahami secara benar tentang peraturan-peraturan keadministrasian dan ketatausahaan yang bermuara kepada masalah mekanisme dan pengawasan perizinan yang dikeluarkan oleh badan-badan eksekutif.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, hal 169.

<sup>20</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, hal 170.

## **B. Penyelidikan**

### **1. Pengertian Penyelidikan**

Penyelidikan ialah cara atau metode aparat hukum yang ditugaskan sebagai penyelidik untuk memperoleh penerangan dalam sebuah perkara yang masih prakira sebelum dilakukannya penyidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam UU. KUHAP BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Point 5 yang berbunyi: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini”.

Maka dari penjelasan di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, ( Makassar: Alauddin University Press, 2013 ), hal 43.

Dalam bukunya M.Yahya Harahap S.H yang berjudul “*pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*” beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku, “*opspornig*” atau dalam istilah inggris disebut sebagai “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (opspornig). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindak pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (opspornig) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas-batas fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan dari segi pengertian dan tindakan.

Tuntutan hukum dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang praperadilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa atau tersangka berhak menuntut ganti-rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Rahman Syamsuddin., *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, hal 44

## 2. Aparat Penyelidik

Bila kita lihat pasal 1 butir 4, orang yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Tegasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya dan tidak lagi dibenarkan (seperti yang dialami masa HIR) adanya campur tangan dari instansi atau pejabat penegak hukum lainnya dalam melaksanakan tindakan penyelidikan sebuah peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

## 3. Fungsi dan Wewenang Penyelidik

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci pada pasal 5 KUHAP. Dalam buku Yahya Harahap, S.H, beliau membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyelidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyelidik.

*Pertama*, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyelidik terbagi 4 bagian yaitu:

### a. Menerima Laporan Pengaduan

Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut.<sup>23</sup> Dalam pasal 1 angka 24-25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan. Sepintas lalu tidak nampak perbedaan

---

<sup>23</sup>Rahman Syamsuddin., *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, hal 45.

antara laporan dan pengaduan tersebut apakah ada persamaan dan perbedaan antara kedua pengertian tersebut? Jawabannya adalah jelas adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya. Titik persamaanya adalah bahwa baik laporan maupun pengaduan keduanya sama-sama berisi pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana yang telah atau sedang dan akan terjadi. Proses selanjutnya apabila pejabat yang berwenang (melakukan penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan) maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut.

b. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah diketahui, bahwa peristiwa yang diberitahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyidik dapat menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilaksanakannya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan.<sup>24</sup>

c. Menyuruh Berhenti Orang Yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa untuk melakukan hal ini aparat

---

<sup>24</sup>Rahman Syamsuddin., *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, hal 46.

tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Karena sebagaimana dalam pasal 4 menegaskan bahwa Polisi Negara RI adalah penyelidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut.

Akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hukum, pejabat penyelidik harus cepat-cepat mendatangi pejabat penyidik atau lebih efesienya penyelidik mempersiapkan “surat perintah” penangkapan atau surat perintah “membawa dan menghadapkan” orang yang dicurigai ke muka penyidik.

#### d. Tindakan Lain Menurut Hukum

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini. Akan tetapi menurut Yahya Harahap, beliau memberikan contoh agar mempermudah pemahamannya sebagai berikut:

Seorang yang dicurigai tidak mau berhenti dan tidak mau menyerahkan identitas yang diminta atau ditanyakan penyelidik. Dari point yang sebelumnya telah kita ketahui penyelidik tidak dapat memaksanya dengan upaya paksa, dan sebagai jalan keluar penyelidik harus pergi meminta surat perintah kepada penyidik untuk dihadapkan padanya. Sekarang, apakah penyelidik dapat memaksa orang tadi untuk berhenti dengan surat perintah penyidik? Dan apakah dapat ditindakan dengan perlakuan lain semacam perampasan surat kartu penduduk dan lainnya?



Sepanjang hal ini memang dapat dilakukan dengan alasan perampasan KTP sebagai tindakan penggeledahan pakaian sebagaimana yang diatur pada pasal 37 ayat 1.<sup>25</sup>

Namun hal ini baru dapat dilakukan jika terjadi penangkapan terhadap tersangka. Jika tidak penggeledahan pakaian tidak dibenarkan. Secara teoritis sangat sulit mengkontruksi acuan tindakan yang konkrit terhadap bunyi pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP yang memerintahkan hal ini. Mungkin praktek hukumlah yang memberi jalan pemecahan atau ketentuan ini dalam praktek lebih berat arahnya menjurus kepada tindakan kekuasaan bagi pejabat penyelidikan.

*Kedua*, kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa: <sup>26</sup>

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

### **C. Penyidikan dan Penyidik**

#### **1. Penyidikan**

pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi:

<sup>25</sup> Rahman Syamsuddin.,SH.,M.H, Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan, hal 47.

<sup>26</sup> Rahman Syamsuddin.,SH.,M.H, Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan, hal 48.

*“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*<sup>27</sup>

Dari bunyi pasal di atas, menurut R. Wiyon, dalam bukunya pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, sedang dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>28</sup>

## **2. Aparat Penyidik**

Dalam pasal 6 KUHAP, ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik yang melakukan tugas. Dari pasal tersebut menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyidik terbagi menjadi 2 bagian sesuai dengan syarat-syaratnya yang ditentukan, yaitu:

### **a. Pejabat Penyidik Polisi**

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi Negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No.27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik

---

<sup>27</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hal 32

<sup>28</sup> R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 36.

diatur dalam BAB 2 PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh, syarat-syaratnya:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.
- b) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepolisian R.I.

2) Penyidik Pembantu, syarat-syaratnya:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Dua Polisi.
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a).
- c) Diangkat oleh Kepala R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai<sup>29</sup> fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: penyidik pegawai negeri sipil

---

<sup>29</sup>Rahman Syamsuddin., *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, hal 50.

sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berikut kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil:

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:
  - a) Koordinasi penyidik polri,dan
  - b) Di bawah pengawasan penyidik polri.
- 2) Penyidik polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat 1)
- 3) Penyidik pegawai negeri tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di disidiknya (pasal 107 ayat 2).
- 4) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik polri (pasal 107 ayat 3).
- 5) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada penyidik polri maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum (pasal 109 ayat 3).<sup>30</sup>

#### **D. Tersangka**

##### **1. Pengertian Tersangka atau Terdakwa**

Dalam pasal 1 butir 14 KUHP memberi definisi Tersangka sebagai berikut.

---

<sup>30</sup>Rahman Syamsuddin., *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, hal 51.

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.<sup>31</sup>

*Wetboek van Strafvordering* Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*), tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun demikian, dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP. Adapun pengertian *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada butir 15. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah inggris dibedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan).<sup>32</sup>

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia dimulai diperiksa. Salah satu hak yang sering menimbulkan pro dan kontra dari sarjana hukum ialah hak tersangka atau terdakwa untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun oleh hakim.

Di inggris berlaku ketentuan bahwa pemeriksa harus mulai dengan mengatkan kepada tersangka bahwa tersangka mempunyai hak untuk diam tidak menjawab pertanyaan.<sup>33</sup>

Menurut pendapat penulis, kebebasan tersangka atau terdakwa dalam hal memberikan keterangan menurut KUHAP seperti tersebut, masih perlu di hayati oleh para penegak hukum. Bukan saja pemeriksa atau penyidik yang harus

<sup>31</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 35.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal 65.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal 67.

menyadari tugas yang dipikulkan ke pundaknya, yaitu mencari kebenaran materiil demi untuk kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga tersangka itu sendiri harus dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh undang-undang.

Kemiskinan dan kebodohan merupakan hambatan utama dalam menerapkan hukum yang telah tersusun rapi dan lengkap. Misalnya kebebasan tersangka atau terdakwa untuk menunjuk penasihat hukumnya, baru dapat dinikmati sepenuhnya oleh golongan kaya dan berada dalam masyarakat, sedangkan bagi golongan miskin dan bodoh masih merupakan jaminan di atas kertas.<sup>34</sup>

## **2. Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa**

Secara umum dapat dipahami bahwa hukum itu adalah sebuah norma atau kaidah yang menjadi pedoman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar, maka dikenakan sanksi oleh otoritas yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum tersebut. Dengan pengertian hukum seperti ini, maka dapat dipahami bahwa norma hukum berbeda dengan norma-norma lain yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti norma adat, norma kesopanan, norma agama serta norma lainnya, yang tidak memiliki unsur pemaksa secara eksternal bagi pelanggar norma-norma non hukum tersebut.

Jadi, jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), maka norma hukum sangat penting digunakan sebagai instrumen yang menegakkan HAM. Substansi atau nilai HAM meliputi keadilan, persamaan, kepastian, ketenangan,

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal 69.

perlindungan, ketenteraman, kesejahteraan, dan juga manfaat bagi manusia. Inilah kaitan antara hukum dan HAM.<sup>35</sup>

Pada intinya sarana untuk mengontrol pemerintahan adalah hukum dan objek atau sasaran yang akan dilindungi ialah rakyat (warga sipil). Dengan demikian konsep negara hukum sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap HAM. Bahkan substansi Negara Hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap HAM.<sup>36</sup>

Sangat jelas uraian konsep Negara Hukum erat kaitannya dengan perlindungan hukum dan konsep HAM, bahkan substansi Negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap HAM. Itulah sebabnya Indonesia selain menyatakan secara tegas dalam UUD 1945 bahwa merupakan Negara hukum juga hasil amandemen terhadap UUD 1945 yang kedua telah mengatur secara rinci tentang perlindungan HAM dalam Bab XA.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam konsep Negara hukum yaitu meliputi: pengakuan dan perlindungan HAM, Negara berdasarkan teori *trias politica*, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan UU, ada peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, kepastian hukum, persamaan demokrasi, dan pemerintah yang melayani kepentingan umum.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 23.

<sup>36</sup>Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional)*, hal 24.

<sup>37</sup> Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional)*, hal 26.

Mengenai hubungan antara HAM dan hukum, sangat jelas dikemukakan oleh A. Masyhur Effendi, dkk bahwa keberadaan HAM mendahului hukum. Artinya, hak asasi manusia sebagai hak dasar dan suci melekat pada setiap manusia sepanjang hidupnya sebagai anugrah Tuhan lewat seperangkat aturan hukum yang ada, juga memformalkan hak asasi manusia ke dalam seperangkat aturan hukum yang ada.

Baik hak asasi maupun hak dasar apabila sudah dituangkan dalam instrumen hukum, maka sudah menjadi legal right sehingga setiap orang terlebih pemerintah harus menghormati melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Hak-hak yang dimaksud inilah yang umum dikenal sebagai hak asasi manusia dan sudah dipandang bersifat universal atau yang sudah sesuai dengan standar internasional.<sup>38</sup>

Adapun hak-hak yang diberikan tersangka atau terdakwa oleh KUHAP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Hak-hak itu meliputi:

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)).
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (pasal 51 butir a dan b).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti (pasal 52)
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat (1)).

---

<sup>38</sup>Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional)*, hal 17.



- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54).
- f. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma.
- g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (pasal 57 ayat (2) ).
- h. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (pasal 58).
- i. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga (pasal 59 dan 60)
- j. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (pasal 61)
- k. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (pasal 62).
- l. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63).
- m. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (pasal 65).
- n. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (pasal 68).

- o. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya (pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).<sup>39</sup>

Masih ada hak-hak tersangka atau terdakwa yang lain, seperti di bidang penahanan penggeledahan, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan hak-hak di atas ialah bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan, telah berlaku asas akusator (*accusator*).

Asas akusator telah dianut pada pemeriksaan pendahuluan, ialah adanya jaminan yang luas terutama dalam hal bantuan hukum. Dari sejak pemeriksaan dimulai, tersangka sudah dapat meminta bantuan hukum, bahkan pembicaraan tersangka dan penasihat hukumnya tidak didengar atau disaksikan oleh penyidik atau penuntut umum. Kecualiannya ialah jika tersangka didakwa melakukan delik terhadap keamanan negara.<sup>40</sup>

## ***E. Salah Tangkap***

### **1. Pengertian Salah Tangkap**

Pengertian mengenai istilah salah tangkap (*error in persona*) tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap (*error in persona*) ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap (*error in persona*) adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

---

<sup>39</sup> jur.Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 70.

<sup>40</sup> jur.Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal 70.

Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya.

Menurut M.Yahya Harahap, menjelaskan bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan

sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan. Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*.<sup>41</sup>

Dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arief Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban juga disampaikan

---

<sup>41</sup>Harahap M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP,(penyidikan dan penuntutan)buku I*(jakarta: sinar grafika).

oleh Theo van Boven yang mengatakan bahwa korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak – hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).<sup>42</sup>

## **2. Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Korban Salah Tangkap**

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, untuk dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana,

---

<sup>42</sup>Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006.

pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan tindak pidana yang berlaku, dan secara objektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.

Konsep *liability* dalam hukum pidana atau pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan orang lain bersalah kecuali jika pemikiran atau fikiran orang tersebut jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *actus non facit reum nisi meens isit rea*, yang berarti perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali pikiran orang tersebut jahat.<sup>31</sup> Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana.

penyidik harus bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan yang telah dilakukannya yang berkaitan dengan proses penangkapan, dan penahanan terhadap korban tersebut. Kita sadari, KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa. Namun demikian terdapat beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya :

- a. Perlakuan yang sama didepan hukum;
- b. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- c. Peradilan yang bebas;
- d. Peradilan terbuka untuk umum;
- e. Ganti kerugian;
- f. Keadilan dan kepastian hukum.

Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

Asas praduga tak bersalah dan akusator menempatkan tersangka/terdakwa sebagai subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi. Sehingga, Penyidik sering melalaikan asas tersebut sampai mengakibatkan salah tangkap.

Pertanggungjawaban polisi dalam tindakan salah tangkap, Setiap orang yang membuat kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja membuat (karena kelalaiannya) harus menanggung kesalahan dengan memberikan pertanggungjawaban. Ia bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Pertanggungjawaban ini sebagian besar sudah diatur oleh hukum. Yaitu oleh hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara.

Bertanggungjawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti berkewajiban menanggung segala akibat dari perbuatan seseorang tersebut yang disengaja maupun yang tidak disengaja sebagai bentuk perwujudan kesadaran akan kewajiban atas apa yang telah dibuat, baik perbuatan yang merugikan maupun menyenangkan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>S. WojoWarsito, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2005).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah kualitatif, yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>44</sup>

Penelitian judul proposal yang diangkat oleh penulis ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bulukumba. Adapun menjadi lokasi penelitian yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penyelesaian penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba.

##### ***B. Metode Pendekatan***

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu cara/metode yang digunakan melalui inventarisasi penerapan hukum terhadap pencegahan tindak pidana, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil mengenai proses penyidikan tersangka salah tangkap di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba.

##### ***C. Sumber Data***

###### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang bersumberkan dari informasi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan atau objek penelitian. Sumber data

---

<sup>44</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Pendekatan Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 166.

primer merupakan kata-kata pihak-pihak yang diwawancarai dan data ini adalah sumber data pendukung, yang diperoleh dari informan.

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian.<sup>45</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah salah satu anggota polisi di Kepolisian Resor Bulukumba yang terjun langsung dalam proses penyelidikan, dan juga kepala Dusun dari korban salah tangkap tersebut yang berkedianan di Bolaperringe, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

## 2. Data sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh dengan cara mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti berupa bahan hukum primer yakni dapat diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku, makalah-makalah, jurnal ilmiah, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini, yang berkaitan tentang proses penyelidikan tersangka salah tangkap.

## 3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain, yang mendukung penelitian penulis tentang proses penyelidikan tersangka salah tangkap.

---

<sup>45</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2017), hal 108.



#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

##### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.<sup>46</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan di Kepolisian Resor Bulukumba terhadap tersangka sehingga terjadi salah tangkap.

##### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen atau buku. Metode ini penulis gunakan untuk menggali catatan-catatan tertulis atau dokumen-dokumen resmi Kepolisian.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari informan sebagai sumber data penting dalam penelitian<sup>47</sup>. Instrumen dalam penelitian yaitu pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang diajukan dalam melakukan wawancara terhadap salah satu anggota polisi di Kepolisian Resor Bulukumba dan Kepala Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

---

<sup>46</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, hal 108.

<sup>47</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Pendekatan Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan*, hal 60.

#### ***F. Metode Pengolahan dan Analisis Data***

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif, dimana penganalisaan data yang dikumpulkan dari responden yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Analisis ini digunakan dengan maksud agar peneliti mempunyai kebebasan yang luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah. Dan data yang sudah dianalisis dikumpulkan dan pada akhirnya akan nampak gambaran umum hasil penelitian tersebut.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan dari jazirah Sulawesi selatan dan berjarak 153 km dari Makassar (ibu kota provinsi Sulawesi selatan). Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67<sup>2</sup> km, jumlah penduduk kabupaten Bulukumba kurang lebih 347,338 jiwa. Secara geografis Kota Bulukumba terletak antara 05° 20' – 05° 40' LS dan 119° 58' – 120° 28' BT. (Bulukumba Dalam Angka, 2009).

Secara administratif Kabupaten Bulukumba memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Pulau Selayar.

Keadaan topografi yang dikambaran sebagai berikut : daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang, Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari barat ke utara

dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian kiri Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

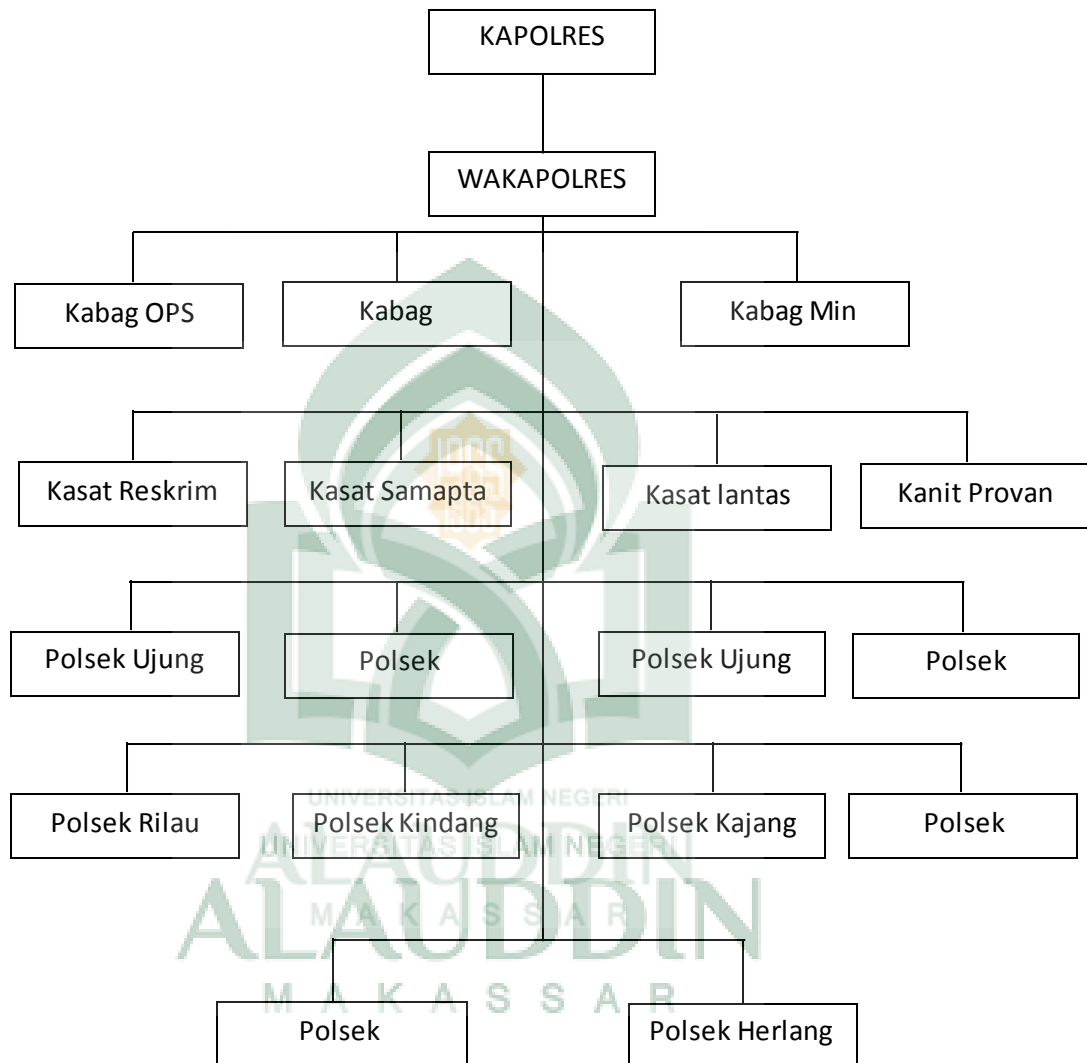
Keadaan iklim Kabupaten Bulukumpa mempunyai suhu rata-rata berkisaran antara 23,87°C– 27,68°C suhu pada kisaran ini cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis smithferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim Kabupaten Bulukumpa termasuk iklim lembab atau agak basah.

Fasilitas Transportasi Kabupaten Bulukumpa berfungsi sebagai pintu penghubung antara Kabupaten di bagian Timur yang menghubungkan Pulau Sulawesi dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mendukung fungsi tersebut, maka di Kabupaten Bulukumpa terdapat pelabuhan laut yaitu (1) Pelabuhan Penyeberangan ferry, (2) Pelabuhan Nelayan dan sebagai akses penghubung antar Kabupaten. Dari barat ke utara atau sebaliknya, jalan trans Kabupaten di Kabupaten Bulukumpa cukup baik dan memadai.

Pada pengembangan sistem transportasi regional jalan raya Kabupaten Bulukumpa dapat dihubungkan dengan kota-kota Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumpa, melalui jalan negara dengan kondisi serta intensitas lalu lintas yang cukup baik.

Struktur jajaran di Kepolisian Resor Bulukumpa. Kepala Kepolisian Resor Bulukumpa bernama AKBP, Arif Rahman, Wakapolres AKP Novly, F. Fotoy, Kabag OPS Kompol A. Muh. Amir, Kabag Min AKP Basri, S.H, Kabag binamitra Kompol H. Muh. Arfah, S.Ag, Kasat Reskrim AKP Jawaluddin, SH, MH, Kasat Lantas AKP Tahang Abdullah, Kasat Samapta AKP Muh. Jufri, Kanit Provos Iptu

H. Muh. Yusuf. Struktur Kepolisian Resor Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : Bagian Administrasi Kepolisian Resor Bulukumba

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP, Arif Rahman, diperoleh informasi bahwa guna mewujudkan peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan

pelayan masyarakat, maka tugas Kepolisian Resor Bulukumba secara umum pada tahun 2010 dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan deteksi dini terhadap kecenderungan sosial politik, sosial, ekonomi, sosial budaya, kerawanan kamtibmas antara lain yang berdimensi baru, kejahatan kekerasan, kejahatan yang melibatkan kelompok massa serta kejahatan ekonomi agar dapat dicegah sedini mungkin supaya tidak menjadi ancaman yang lebih luas.
2. Melakukan kegiatan frepentif dalam rangka menangkalgangguan kamtibmas melalui bimbingan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat untuk meningkatkan potensi partisipasi masyarakat dalam sistem bimbingan keamanan dan ketertiban masyarakat (sisbin kamtibmas).
3. Meningkatkan kegiatan preventif dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran, memberikan bantuan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat serta kegiatan masyarakat baik bersifat lokal, nasional.
4. Meningkatkan kegiatan refresif dalam rangka menegakkan hukum dan dalam menindak tegas setiap pelaku tindak pidana.
5. Menyiapkan pengamanan, khususnya dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berkadar tinggi yang dapat terjadi diawal maupun setelah pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksana.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>AKBP, Arif Rahman (Kapolres Bulukumba, Wawancara tanggal 19 Maret 2018)

Secara struktur organisasi, satuan-satuan tugas pada Kepolisian Resor Bulukumba, adalah sebagai berikut:

1. Kasat Reserse dan kriminal membawahi satuan reskrim yang bertugas menangani tindakan-tindakan kriminal secara umum yang ada dalam masyarakat.
2. Kasat Reserse dan kriminal terkadang juga membantu satuan narkotika dalam menumpas peredaran gelap narkotika dan satuan lalu-lintas jika terjadi kecelakaan lalu-lintas yang diduga merupakan tindakan kriminal. Tugas lainnya adalah membawahi satuan narkoba yang bertugas membongkar dan menangani jaringan pengedar narkotika dan psikotropika dan bahan-bahan aditif lainnya yang berbahaya.
3. Kasat lantas membawahi satuan lalu-lintas yang mengendalikan kelancaran berlalu-lintas sampai menindak tegas para pelanggar lalu-lintas.
4. Kabag Binamitra membawahi satuan binamitra yang bertugas menggalang hubungan baik dengan mitra polisi yang ada, misalnya untuk saat ini mitra polisi yang sangat erat adalah masyarakat, maka satuan binamitra bertugas untuk mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat luas.
5. Kanit provam membawahi satuan provos yakni badan kepolisian yang menangani masalah yang terkait dengan tindakan indisipliner yang dilakukan oleh oknum polisi dilapangan.
6. Kapolsek membawahi satuan kepolisian yang berada dalam sektor tertentu (kecamatan) tetapi masih tetap dalam lingkup Polres, bertugas mengamankan

wilayahnya dan tetap berkordinasi dengan Polres yang merupakan induk dari struktur Kepolisian di Kabupaten.

Selain tugas pokok tersebut, tiap satuan untuk berkoordinasi dengan satuan yang sama, namun dalam jajaran yang berbeda yakni jajaran yang berada di atasnya dan di bawahnya, seperti satuan yang ada di Kepolisian Sulsel-Bar.

Fungsi Reskrim di Kepolisian Resor Bulukumba adalah mmenyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reserse Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana. Fungsi Reserse umum, ekonomi, narkoba, uang palsu, koordinasi PPNS ( Penyidik Pegawai Negeri Sipil ) dan tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi dan pengelolaan pusat informasi kriminal. Sedangkan tugas pokok Sat Reskrim di Kepolisian ResorBulukumba dalam menangani kasus-kasus adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap PPNS berdasarkan Undang-Undang sebagai aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.<sup>49</sup>

#### ***B. Proses Terjadinya Salah Tangkap Dalam Kasus Pemerkosaan Di Kepolisian Resor Bulukumba***

Awal mulanya penangkapan terhadap korban salah tangkap syamsuddin diawali saat mantan istri syamsuddin melihat anaknya yang berinisial NF itu hamil dia langsung saja melaporkan syamsuddin sebagai pelakunya karena di duga ada rasa dendam dari mantan istri syamsuddin. sehingga dia langsung saja menuduh

---

<sup>49</sup>AKP Jawaluddin (Kasat Reserse dan Kriminal, wawancara tanggal 22 Maret 2018).



dan melaporkan langsung ke Kepolisian Resor Bulukumba, dimana anak kandungnya tersebut memiliki penyakit tidak mampu berbicara atau bisu sehingga dia tidak bisa mengelak kalau bukanlah syamsuddin yang menghamilinya.

Tepat sabtu 18 Maret 2017 langsung di jemput aparat Kepolisian Resor Bulukumba di kediamannya di Dusun Bolaperringe, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Syamsuddin di tuduh dengan tuduhan pencabulan. Ia di tuduh mencabuli anak kandungnya sendiri yang kala itu sedang dalam kandungannya sudah lima bulan.

Saat syamsuddin di tahan sejak sabtu dia terlihat dengan keadaan sehat akan tetapi tiba-tiba tepatnya hari senin pagi keluarga pihak syamsuddin mendapat kabar dari Kepolisian Resor Bulukumba yang mengatakan bahwa Syamsuddin tewas dan berada di ruang jenazah.

Para keluarga dan kerabat Syamsuddin sangat kaget mendengar kabar bahwa syamsuddin telah meninggal dunia. Supirman salah satu keluarga Syamsuddin mengatakan kondisi Syamsuddin saat dijemput aparat Kepolisian Resor Bulukumba dia dalam keadaan sehat. Saat beberapa keluarganya mendatangi jenazah Syamsuddin di RS Sultan Dg Raja, keluarga maupun kerabat yang datang pada saat itu melihat beberapa luka di tubuh Syamsuddin.

Berdasarkan visum yang dilakukan pihak RS Sultan Daeng Raja, pada tubuh syamsuddin memang ditemukan sejumlah luka memar dan luka robek. Di bagian kepala juga terdapat benjolan, atas kejanggalan peristiwa yang tiba-tiba meninggal dunia dan memiliki banyak bekas luka pihak keluarga mempertanyakan peristiwa itu.

Puluhan keluarga almarhum Syamsuddin warga asal Dusun Bolaperringe Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa mendatangi Mapolres Bulukumba, Sulawesi Selatan. Warga mendatangi Mapolres karena meninggalnya seorang tahanan almarhum Syamsuddin dinilai ganjal.

Keluarga almarhum marah dan meminta Kapolres Bulukumba untuk menyelidiki siapa pelaku penganiaya Syamsuddin dalam sel Kepolisian Resor Bulukumba. Karena pihak kepolisian hanya memberi janji untuk menyelidiki tapi belum ada hasil, puluhan keluarga almarhum Syamsuddin melakukan tiga kali aksi untuk dapat mengungkap siapa pelaku sebenarnya sehingga almarhum Syamsuddin meninggal dunia di tahanan.<sup>50</sup>

Akhirnya penyidik yang dipercayakan menyelesaikan kasus ini mendapatkan alat bukti diantaranya, alat yang digunakan menganiaya serta keterangan saksi-saksi dan pengakuan para tersangka adapun barang bukti yang diamankan dari lokasi, yakni berupa potongan kayu bulat, plastik, kain, slaber, pipa, dan mistar penggaris.

Penyidik memastikan, kasus ini tak hanya mentok pada penetapan ketujuh tersangka. Pihaknya juga tetap akan melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mencari kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penganiayaan berujung meninggal dunia. Saat ditemukannya tujuh tersangka penyidik tetap masih melakukan penyidikan berlanjut.

---

<sup>50</sup>Supirman, salah satu anggota keluarga almarhum Syamsuddin, wawancara tanggal 04 Maret 2018

Berdasarkan keterangan penyidik, pada saat pemeriksaan seringkali tersangka diperlakukan kasar, misalnya ketika penyidik menanyakan suatu pertanyaan yang terlambat dijawab tersangka atau tersangka menjawabnya berbelit-belit. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka/terdakwa berhak memberi keterangan “secara bebas” baik kepada penyidik pada tahap penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kompol Agus Chaerul yang melakukan penyidikan tersebut mendapatkan bahwa penganiayaan terhadap almarhum Syamsuddin dilakukan di dua lokasi atau tempat kejadian perkara (TKP). Pertama, penganiayaan yang dialami almarhum Syamsuddin berlangsung di ruang sel tahanan Kepolisian Resor Bulukumba, yang dilakukan langsung oleh salah satu dari ke tujuh tersangka yang bernama Rajamuddin. Tersangka memang sudah mengakui perbuatannya melakukan penganiayaan terhadap korban di sel tahanan.

Lokasi kedua, berada di ruang penyidik Jatanras Unit PPA Kepolisian Resor Bulukumba. Di dalam ruangan tersebut, korban dianiaya oleh enam tersangka masing-masing Bripda FI, RI, AY, AF, FS, dan FR. Ketujuh tersangka dari lokasi pertama dan keenam dari lokasi kedua memang ditetapkan berdasarkan hasil penyelidikan yang kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>AKP Jawaluddin (Kasat Reserse dan Kriminal, wawancara tanggal 22 Maret 2018).

Penetapan tersangka ini setelah kasus tersebut menjadi sorotan masyarakat hingga diramalkan aksi unjuk rasa selama seminggu yang dilakukan para aktivis penggiat hak asasi manusia (HAM) bersama beberapa mahasiswa dan kerabat korban.

saat meninggalnya almarhum Syamsuddin keluarga dari korban tersebut mengungkapkan bahwa pelaku yang menghamili anak kandungnya sendiri ternyata bukan almarhum Syamsuddin melainkan sepupu dari anak kandung dari korban. Sepupunya sendiri yang telah mengakui bahwa dia telah melakukannya yang sudah dua kali melakukan pencabulan tersebut.

kasus meninggalnya almarhum Syamsuddin telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan dan sudah terbukti para tersangka yang melakukannya kemudian peristiwa salah tangkap atas tuduhan pencabulan anak kandung sendiri ternyata itu salah. Para keluarga Syamsuddin meminta polisi agar dapat bekerja secara profesional karena mau apalagi, korban tersebut telah meninggal dunia.

Keluarga Syamsuddin menuntut agar menuntaskan kasus ini dan juga menindaklanjuti tuduhan kepada korban sebagai pelaku yang membuat korban dicemarkan nama baiknya. Keluarga korban, saat ini bersabar dan menahan diri serta bisa menyerahkan seluruh kasus yang dialami korban ke pihaknya. Termasuk kasus pencabulan yang dituduhkan kepada korban.

Salah satu aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di sulsel yang bernama Rahmat Ardiansyah membantu korban dengan tegas dia mengatakan kepada Aparat Polres Bulukumba dalam hal ini kasus almarhum Syamsuddin dengan tuduhan pencabulan Aparat Polres harus bertanggungjawab.

Terjadinya salah tangkap ini terkait tentang kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi. Dimana polisi profesional adalah polisi yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas pendidikan yang di terimanya sekaligus mampu menggunakan instrumen-instrumen hasil pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh pada saat penelitian di Satreskrim Kepolisian Resor Bulukumba terungkap bahwa personel yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi hanya ada beberapa saja, sehingga membutuhkan lagi tambahan polisi yang berkualitas untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas penyidikan yang mengalami hambatan karena masih sedikitnya penyidik yang benar-benar memiliki profesionalitas kerja yang baik, hal ini mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang ada di masyarakat.

Masih sedikitnya personel di Kepolisian Resor Bulukumba yang memiliki profesionalitas kerja yang tinggi membawa akibat bagus atau tidaknya pekerjaan mereka dilapangan. Jia profesionalisme dan keahlian polisi masih rendah maka untuk penyelesaian tugas-tugasnya tidak akan terlaksana dengan optimal.<sup>52</sup>

### ***C. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Resor Bulukumba***

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat dilakukan penuntutan. Bertanggungjawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti berkewajiban menanggung segala

---

<sup>52</sup>Rahmat Ardiansyah, salah satu aktivis Hak Asasi Manusia, wawancara tanggal 05 maret 2018

akibat dari perbuatan seseorang tersebut yang disengaja maupun yang tidak disengaja sebagai bentuk perwujudan kesadaran akan kewajiban atas apa yang telah dibuat, baik perbuatan yang merugikan maupun menyenangkan.

Tanggung jawab merupakan ciri dari seseorang yang beradab karena seseorang merasa bertanggungjawab sehingga seseorang tersebut menyadari akibat baik atau buruknya perbuatannya tersebut. Dalam KUHAP terdapat peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara harfiah salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

Terdapat dalam kasus salah tangkap almarhum Syamsuddin yang dilakukan oleh seorang penyidik Kepolisian Resor Bulukumba. Kekeliruan yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam penangkapan, dimana almarhum yang dituduh oleh mantan istrinya melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri, dimana anak tersebut mengalami penyakit yakni tidak mampu berbicara atau tuna rungu. Sehingga tanpa berfikir panjang lebar Syamsuddin tersebut di tangkap dan di bawa ke sel tahanan Kepolisian Resor Bulukumba.

Kepolisian Resor Bulukumba, jika melakukan kesalahan terkait terjadinya salah tangkap maka akan melakukan pertanggungjawaban dengan cara praperadilan. Yang dimana lembaga praperadilan merupakan lembaga yang lahir bersamaan dengan lahirnya KUHAP. Lembaga ini bukanlah lembaga yang mandiri atau berdiri sendiri melainkan merupakan lembaga yang menempel pada Pengadilan Negeri, yang secara kasus demi kasus Ketua Pengadilan Negeri untuk memutus suatu perkara yang diajukan. Jadi, tidak ada sidang Praperadilan.

Tujuan dari praperadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara memeriksa yang diperiksa. Hukum memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang diberi melalui praperadilan. Di dalam KUHAP terdapat unsur baru yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan hukum seperti dalam penyidikan, bantuan hukum, praperadilan, penuntutan, ganti rugi, peninjauan kembali, dan pengawasan pelaksanaan pengadilan.

Sifat praperadilan berfungsi sebagai pencegahan terhadap upaya paksa sebelum seorang diputus oleh pengadilan. Pencegahan yang dimaksud disini dapat berupa pencegahan terhadap tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara serta pencegahan terhadap tindakan yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban dalam bentuk praperadilan tersebut tidak lakukan sebab almarhum Syamsuddin atau selaku korban salah tangkap telah meninggal dunia di sel tahanan. Untuk itu penyidik hanya menuntaskan akibat kematian almarhum Syamsuddin di sel tahanan dan memberikan sanksi terhadap oknum polisi yang telah melakukan penganiayaan tersebut.

Pada hari rabu 09 agustus 2017, dua terdakwa oknum polisi yang telah melakukan penganiayaan, Bripka Fitriani satu dari dua terdakwa oknum polisi Kepolisian Resor Bulukumba telah di vonis bersalah dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan putusan hukum tersebut, majelis mengambil putusan untuk terdakwa Fitriani dinyatakan di dakwa dalam dakwaan sekunder yang terbukti telah

melakukan penganiayaan dan menjatuhkan putusan selama 5 tahun 6 bulan. Bripta Fitriani dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang berujung tewasnya tahanan saat jalani penyidikan.

Sedangkan satu terdakwa oknum polisi lainnya, Muh.Rijal juga dijerat pasal yang sama atas Undang-Undang penganiayaan dengan tuntutan penjara selama satu tahun dipotong masa tahanan. Selain kedua oknum polisi, Pengadilan Negeri Bulukumba lebih dulu telah menetapkan kepada terdakwa Akbar Bahri dan Akbar Yusuf sebagai terdakwa dan di jatuhi vonis penjara selama 2 tahun kurungan. Keduanya merupakan anak dibawah umur yang ikut terlibat penganiayaan tersebut.<sup>53</sup>

Selanjutnya atas sikap profesional aparat yang melakukan penangkapan terhadap almarhum Syamsuddin yang ternyata bukanlah dia pelakunya. Pelaku sendiri yang telah mengaku bahwa dia yang telah melakukan pemerkosaan tersebut terhadap anak almarhum Syamsuddin, Pelaku tersebut tidak lain yaitu sepupu dari anak almarhum Syamsuddin yang berinisial IF.

Kepolisian Resor Bulukumba melakukan gelar perkara dan memutuskan meningkatkan syamsuddin menjadi tidak bersalah. Karena kekeliruan oknum polisi saat penangkapan bertindak asal dan cepat sehingga kurang cermat dengan mementingkan diri sendiri agar penyelesaian tugas penyidikan dapat berakhir dengan cepat, hal ini yang mmembuat terjadinya kelalaian penyidik dalam melakukan proses tersebut. Atas gelar Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba yang mengatakan almarhum Syamsuddin tidak bersalah, maka perbaikan nama atas

---

<sup>53</sup>Kompil Agus Chaerul( penyidik, wawancara tanggal 23 maret 2018 ).



almarhum Syamsuddin pun kembali pulih. Dan berita tersebut di sebaran ke media agar seluruh masyarakat dapat mengetahuinya.<sup>54</sup>

Pengertian mengenai istilah salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harafiah arti dari salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditelaah bahwa terdapat berbagai macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan pada saat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Penangkapan merupakan tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik. Kasus salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik bukan merupakan tindak pidana, sebab tidak mengandung unsur tindak pidana dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya. Unsur-unsur dari tindak pidana yang dimaksud adalah adanya “kesengajaan” dan dengan sadar melakukan perbuatan yang melanggar peraturan yang telah ada, serta dengan “dikehendaknya” melakukan perbuatan pidana. Perbuatan kesalahan yang dilakukan penyidik bukanlah perbuatan yang

---

<sup>54</sup> Liputan6.com, 22 Maret 2017.

dikehendaki oleh penyidik, yang mendatangkakan kerugian bagi korban, karena tujuan dari penangkapan oleh penyidik adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam suatu perkara terhadap pihak terkait untuk dimintai keterangan, hingga mendapatkan titik terang dan menyelesaikan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Perilaku Polri yang bertindak asal dan cepat sehingga kurang cermat dengan mementingkan diri sendiri agar penyelesaian tugas penyidikan dapat berakhir dengan cepat, hal ini yang membuat terjadinya kelalaian penyidik dalam melakukan proses penyidikan, sehingga hak asasi manusia dikesampingkan, yang mengakibatkan terjadi penangkapan terhadap seseorang yang tidak bersalah, yang mengakibatkan terjadinya penangkapan terhadap seseorang yang tidak bersalah, yang tentu saja dapat merugikan pihak-pihak yang terkait, dan tidak menjaga dan menjunjung tinggi martabat negara terutama Kepolisian itu sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003.

Kesalahan penangkapan ini merupakan suatu kelalaian penyidik dalam proses pidana yang mana proses pidana yang dimaksud adalah dalam hal proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga dalam permasalahan ini dapat diselesaikan melalui lembaga praperadilan. Penyidik terkadang mengenai kasus yang masih kurang jelas dalam uraian identitas pelakunya dalam melaksanakan tugas, untuk itu Polri sebagai penyidik terkadang kesulitan untuk menemukan penyelesaian dalam proses penyidikan.

Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk kedalam pelanggaran disiplin maupun Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik

Indonesia. Kesalahan dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota Kepolisian. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan juga dapat terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya.

Sanksi yang dapat diberikan dalam kesalahan penangkapan ini dapat diberikan kepada penyidik merupakan sanksi administrasi yaitu pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi dari tugas sebagai efek jera atas perbuatannya, dan untuk korban diberikan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian atau rehabilitasi. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab oleh penyidik karena telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi korban. Dari sanksi diatas dapat disimpulkan bahwa salah tangkap bukan merupakan suatu tindak pidana.

Perbuatan pelanggaran oleh Polri dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian. Pada Pasal 1 Angka 1 definisi pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, Peraturan Disiplin dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melalui rangkaian pembahasan tentang kasus salah tangkap di kepolisian resor bulukumba, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada awal mulanya penangkapan terhadap korban salah tangkap syamsuddin diawali saat mantan istri syamsuddin melihat anaknya yang berinisial NF itu hamil dia langsung saja melaporkan syamsuddin sebagai pelakunya karena di duga ada rasa dendam dari mantan istri syamsuddin. sehingga dia langsung saja menuduh dan melaporkan langsung ke Kepolisian Reso Zar Bulukumba, dimana anak kandungnya tersebut memiliki penyakit tidak mampu berbicara atau bisu sehingga dia tidak bisa mengelak kalau bukanlah syamsuddin yang menghamilinya.
2. Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat dilakukan penuntutan. Karena korban salah tangkap tersebut meninggal dunia, maka bentuk pertanggungjawaban dengan cara praperadilan tersebut tidak dilanjutkan melainkan penyidik yang telah melakukan salah tangkap tersebut diberikkan sanksi yang berupa sanksi administrasi, efek jera, dan sekaligus penyidik harus melakukan pemulihan nama baik atas korban.

### ***B. Saran***

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kasus salah tangkap seseorang penyidik di Kepolisian Resor Bulukumba. Di mana dalam proses tersebut penyidik yang melakukan salah tangkap diberikan sanksi yakni sanksi administrasi, efek jera dan penyidik harus melakukan pemulihan nama baik atas korban. Oleh sebab itu, penyidik seharusnya jika melakukan suatu penangkapan harus lebih teliti dalam melakukan penyelidikan agar tidak terjadi lagi kasus salah tangkap.

Selain itu, pada penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwasanya masih terdapat begitu banyak kekurangan, keterbatasan, dan kesalahan yang membutuhkan koreksi, teguran dan kritikan dari pembaca. Untuk menjadi bahan renungan penulis demi kesempurnaan penelitian dan hasil yang lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Natsif Fadli, 2016. *Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional)*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Aris Ismail dan Syamsuddin Rahman, 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Bungin Burhan, 2017. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Hamzah Andi, 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ilyas Amir, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & puKAP-Indonesia: Yogyakarta.
- Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP, (penyidikan dan penuntutan) buku I*, Sinar grafika: Jakarta.
- Pangaribuan Luhut M.P, 2013. *Hukum Acara Pidana*, Papas Sinar Sinanti: Depok Timur.
- Prasetyo Teguh, 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media: Bandung.
- Sutinah dan Suyanto Bagong, 2010. *Metode Pendekatan Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Syamsuddin Rahman, *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*.
- Waluyo Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Warsito S. Wojo, 2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Wiyono R, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana: Jakarta.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKP Jawaluddin

Jabatan : Kasat Reserse dan Kriminal

Alamat : Jalan Pahlawan Poros Bulukumba Sinjai

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : A. Indah Anugrah

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Alamat : Samata, Gowa

Telah melakukan wawancara pada tanggal 19 Maret 2018 bertempat di Kepolisian  
Resor Bulukumba guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul  
“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES SALAH TANGKAP DI  
KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA”

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

April  
Bulukumba, 24 April 2018  
(AKP Jawaluddin)

)

## RIWAYAT HIDUP



**A. Indah Anugrah**, lahir di Kabupaten Enrekang pada tanggal 13 Januari 1997. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan A. Azis Kiba dan Rosdiana Syarif, S.E. Penulis memiliki satu kakak perempuan bernama Murtafiah Azis, S.Psi, adik perempuan bernama A. Muthahharah, dan satu adik laki-laki bernama Afdal. Penulis mengawali pendidikan formal di TK Pertiwi Kab. Enrekang pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2002, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 66 Balangriri Kab. Bulukumba dan tamat pada tahun 2008, pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Negeri 5 Bulukumpa dan tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bulukumba dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar program Strata Satu (S1).

M A K A S S A R